

## PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 2014-2018)

Adam Suryani<sup>1)</sup>, Sarsiti<sup>2)</sup>

<sup>1),2)</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Surakarta

Email: sitiunsa76@gmail.com<sup>1),2)</sup>

### *Abstract*

*This study aims to examine the effect of corporate governance has a significant effect on tax avoidance (tax avoidance) of manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange. This study uses the independent variable Corporate Governance measured using the percentage of the board of independent commissioners, institutional ownership, and the number of audit committees. While the dependent variable used is tax avoidance as measured by CETR. The regression model used in this study is a panel data regression model with the help of Eviews 9. The research sample was selected using a purposive sampling method obtained by 52 manufacturing companies that met the criteria and were listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in the 2014-2018 range. The results obtained show that the percentage of independent directors has no influence on tax avoidance, institutional ownership has an influence on tax avoidance, the number of audit committees has an influence on tax avoidance.*

**Keywords:** *Corporate Governance, Independent Commissioner, Institutional Ownership, Audit Committee, Tax Avoidance*

### PENDAHULUAN

Perusahaan adalah organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang yang kegiatannya untuk mencapai suatu tujuan yang tak lain adalah untuk memperoleh keuntungan atau laba yang dipergunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan. Besar kecilnya laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan seringkali menjadi tolok ukur kesuksesan suatu manajemen dalam mengelola perusahaan dengan didukung oleh kemampuan manajemen dalam melihat kemungkinan dan kesempatan di masa yang akan datang. Penghindaran pajak merupakan kegiatan manipulasi laba dengan tujuan untuk mengurangi jumlah beban pajak yang dibayar melalui perencanaan pajak, baik yang berhubungan dengan *tax evasion* maupun tidak. Dalam melakukan penghindaran pajak perusahaan diperlukan sebuah strategi yang menghindari risiko deteksi agar tindakan penghindaran pajak tersebut tidak melanggar peraturan, sehingga pemerintah (dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak) tidak dapat menjatuhkan sanksi hukum kepada perusahaan, meski perilaku ini akan mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak (Minnick dan Noga, 2010).

Adanya konflik keagenan antara manajer dan pemilik perusahaan maka peran *corporate governance* diharapkan dapat mengendalikan akibat dari masalah agensi tersebut terhadap penghindaran pajak. *Corporate governance* merupakan sistem pengendalian internal perusahaan terhadap kinerja manajemen sebagai pengelola perusahaan yang memiliki tujuan mengurangi risiko timbulnya konflik keagenan antar pemegang saham agar memenuhi tujuan bersama melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. Penerapan *corporate governance* yang efektif dalam jangka panjang dipercaya dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan menguntungkan para pemegang saham serta dapat meminimalkan risiko keputusan yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja (Solihin, 2009).

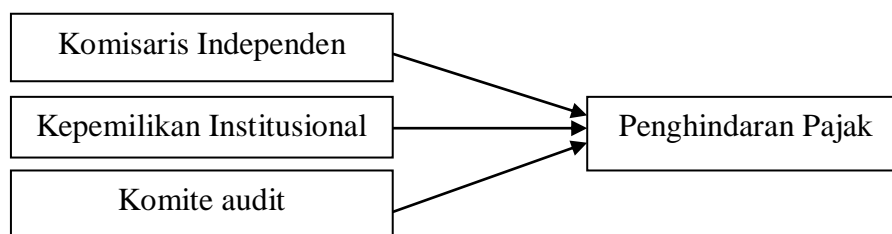
## TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) mendeskripsikan *agency theory* (teori keagenan) sebagai kontrak kerja antara *principal* dan *agent*, yang mana satu atau beberapa *principals* (pemilik) mendelegasikan beberapa otoritas mereka untuk membuat keputusan kepada agen (manajer). Seorang manajer harus menyediakan informasi yang berkaitan dengan kondisi perusahaan kepada *owner* atau pemilik, seperti pengungkapan informasi akuntansi dalam bentuk laporan tahunan sebagai evaluasi kinerja manajer (Masridan Martani, 2012). Teori agensi mengarah pada kondisi dimana sering terjadi ketidakseimbangan informasi antara pemilik dan manajer dalam mencapai tujuan perusahaan. Teori agensi memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai agen bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri (*self-interest*) bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham (Solihin, 2009). *Corporate governance* merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku (Solihin, 2009).

### Kerangka Pemikiran:

Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak (Y) sebagai variabel dependen. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah Komisaris Independen ( $X_1$ ), kepemilikan institusional ( $X_2$ ), dan Komite Audit ( $X_3$ ).



Gambar 1  
Kerangka Pemikiran

### Hipotesis:

#### 1. Komesaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Dari perspektif teori agensi, anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar perusahaan (Komisaris Independen) berperan untuk mengawasi jalannya peran eksekutif yang lain (Solomon, 2007). Apabila tidak ada pengawasan dari Komisaris Independen, maka akan semakin besar kemungkinan eksekutif yang lain dapat memanipulasi posisi mereka dengan mendapatkan *control* yang penuh atas remunerasi mereka sendiri dan mengamankan jabatan mereka (Solomon, 2007), sehingga dapat merugikan pemegang saham. Sebaliknya, semakin besar Proporsi Komisaris Independen, maka akan dapat meningkatkan kinerja dan kekayaan pemegang saham (Minnick dan Noga, 2010). Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Komisaris Independen akan memaksimalkan kinerja dewan komisaris dalam tugasnya melakukan pengawasan terhadap usaha memaksimalkan laba perusahaan, maka hipotesis yang diajukan :

H1 : Presentase Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

#### 2. Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Penelitian yang dilakukan oleh Shafer dan Simmons (2006) menemukan bahwa Kepemilikan Institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer dalam manajemen pajak. Argumentasi tersebut didukung oleh penelitian Khurana dan Moser (2009) yang menemukan besar atau kecilnya konsentrasi Kepemilikan Institusional akan mempengaruhi kebijakan penghindaran pajak oleh perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan :

H2 : Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

### 3. Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Diantari dan Ulupui (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa keberadaan Komite Audit memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi keberadaan Komite Audit dalam perusahaan akan meningkatkan kualitas *corporate governance*, sehingga akan memperkecil kemungkinan terjadinya aktivitas penghindaran pajak. Penelitian Sriwedari (2009), yang menyatakan bahwa keberadaan komite audit yang fungsinya untuk meningkatkan integritas yang kredibilitas pelaporan keuangan agar dapat berjalan dengan baik. Penelitian terkait juga dilakukan oleh Oktofian (2015) yang menyatakan bahwa jumlah Komite Audit berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012), Dewi dan Jati (2014), serta Winata (2014). Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan :

H3 : Komite Audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

## METODE PENELITIAN

### 1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2014-2018. Sampel yang digunakan didapatkan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Berdasarkan teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling*, maka sampel dalam penelitian ini berjumlah 260 sampel yang diperoleh dari 52 perusahaan selama 5 tahun.

### 2. Variabel Penelitian

#### a. Komisaris Independen ( $X_1$ )

Penelitian Aris dan Rejeki (2018) (dalam Sari, 2014) menjelaskan bahwa Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Komisaris Independen diukur dengan menggunakan :

$$KI = \frac{\text{Kepemilikan Saham Institusi}}{\text{Saham Beredar}} \times 100 \%$$

#### b. Kepemilikan Institusional ( $X_2$ )

Kepemilikan Institusional merupakan besarnya saham yang dimiliki institusi. Semakin besar Kepemilikan Institusional menunjukkan efektivitas pengawasan terhadap manajemen. Kepemilikan Institusional dirumuskan dengan:

$$KI = \frac{\text{Kepemilikan Saham Institusi}}{\text{Saham Beredar}} \times 100 \%$$

#### c. Komite Audit ( $X_3$ )

Menurut Sari (2014), Komite Audit adalah suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih. Komite Audit dalam penelitian ini diukur dengan jumlah Komite Audit.

#### d. Penghindaran pajak ( $Y$ )

Penghindaran pajak adalah usaha mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan potongan dan pengecualian yang diperbolehkan peraturan. Penghindaran pajak diprosikan dengan tarif pajak efektif. Penghindaran pajak pada penelitian ini diukur *Cash Effective Tax Rate* (CETR), di mana semakin besar CETR mengindikasikan penghindaran pajak oleh perusahaan semakin rendah

(Kurniasih, 2013). CETR dapat dirumuskan dengan :

$$\text{CETR} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100 \%$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1  
Statistik Deskriptif

Keterangan	Minimum	Maksimum	Mean	Std Deviasi
Penghindaran Pajak	1.242057	93.71327	27.44110	11.70175
Komisaris Independen	20.00000	80.00000	40.20575	10.57743
Kepemilikan Institusional	5.373472	99.42973	69.91916	18.12933
Komite Audit	2.000000	4.000000	3.061538	0.284852

Sumber : Data sekunder yang telah diolah

Berdasarkan tabel 1 hasil statistik deskriptif untuk variabel komisaris independen memiliki nilai minimum sebesar 20,00000 dan nilai maksimum sebesar 80,00000 dan memiliki nilai *mean* dan standar *deviation* masing-masing 40,20575 dan 10,57743. Variabel kepemilikan institusional memiliki nilai minimum sebesar 5,373472 dan nilai maksimum sebesar 99,42973 dan memiliki nilai *mean* dan standar *deviation* masing-masing 69,91916 dan 18,12933. Variabel komite audit memiliki nilai minimum sebesar 2,000000 dan nilai maksimum sebesar 4,000000 dan memiliki nilai *mean* dan standar *deviation* masing-masing 3,061538 dan 0,284852. Variabel penghindaran pajak memiliki nilai minimum sebesar 1,242057 dan nilai maksimum sebesar 93,71327 dan memiliki nilai *mean* dan standar *deviation* masing-masing 27,44110 dan 11,70175.

### 2. Analisis regresi Data Panel

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, maka model regresi data panel yang sesuai dalam penelitian ini yaitu *fixed effect model*. Berikut disajikan hasil pengujian *fixed effect model* sebagai berikut:

Tabel 2  
Hasil Regresi Model *Fixed Effect*

Variabel	<i>Fixed Effect</i>	
	Coefficient	Prob.
Komisaris Independen	-0.087744	0.3889
Kepemilikan Institusional	0.263071	0.049
Komite Audit	-7.36378	0.031
<i>R-squared</i>		0.576725
<i>Adjusted R-square</i>		0.465229
<i>F-statistic</i>		5.172577
<i>Prob (F-Statistic)</i>		0

Sumber : Data sekunder yang telah diolah

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan hasil regresi data panel dengan menggunakan model *fixed effect*. Hasil regresi bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antara variabel independen (komisaris independen, kepemilikan institusional dan komite audit) terhadap variabel dependen (penghindaran pajak).

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk ukuran sampel yang besar dapat diabaikan atau dengan kata lain tidak perlu dilakukan uji normalitas (Ghozali dan Ratmono, 2013).

b. Uji Multikolonieritas

Menurut Ghozali dan Ratmono (2013) uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen dalam penelitian ini. Menurut Ghozali dan Ratmono (2013) salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolonieritas dengan matriks korelasi yaitu koefisien korelasi kurang dari 90 ( $< 0,90$ ) maka model bebas dari multikolonieritas. Berikut ini merupakan hasil dari uji multikolonieritas:

Tabel 3  
Uji Multikolonieritas

	Komisaris Independen	Kepemilikan Institusional	Komite Audit
Komisaris Independen	1.000000	0.194726	-0.047100
Kepemilikan Institusional	0.194726	1.000000	-0.107732
Komite Audit	-0.047100	-0.107732	1.000000

Sumber : Data sekunder yang telah diolah

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa nilai korelasi antar variabel independen kurang dari 0,90 ( $< 0,90$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *White Heteroskedasticity Test*. Apabila *p-value Obs\*R-squared* mempunyai nilai probabilitas *Chi-square* yang signifikan (nilai  $p=0,000$ ). Dengan demikian maka hipotesis alternatif (H1) adanya heteroskedastisitas dalam model tidak dapat ditolak atau dengan kata lain terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi (Ghozali dan Ratmono, 2013). Berikut ini merupakan hasil dari uji *Heteroskedasticity Test White*:

Tabel 4  
Hasil *Heteroskedasticity Test: White*

<i>Heteroskedasticity Test:</i>	<i>White</i>		
<i>F-statistic</i>	0.336869	<i>Prob. F (9,325)</i>	0.7987
<i>Obs*R-squared</i>	1.022408	<i>Prob. Chi-square (9)</i>	0.7958
<i>Scaled explained SS</i>	6.248336	<i>Prob. Chi-square (9)</i>	0.1001

Sumber: Data sekunder yang telah diolah

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas di atas menunjukkan nilai *Obs\*R-squared* mempunyai nilai probabilitas *Chi-square* 0,7958 atau lebih dari 0,05 ( $> 0,05$ ). Hal tersebut menyatakan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah di dalam model regresi linier terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (Ghozali dan Ratmono, 2013). Hasil dari uji autokorelasi dapat dilihat dari nilai Durbin Watson. Apabila Durbin Watson berada pada daerah dU sampai 4-dU dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung autokorelasi. Berikut disajikan gambar uji autokorelasi dengan menggunakan tabel Durbin Watson:

Autokorelas i positif	Ragu -ragu	Tidak ada Autokorelasi	Ragu -ragu	Autokorel asi negatif
	dL	dU	4-dU	4-dL

Gambar 2  
Uji Autokorelasi

#### 4. Pengujian Hipotesis

##### a. Uji statistik F

Uji statistik F pada dasarnya dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membandingkan antara F hitung dengan F tabel dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Berdasarkan tabel diatas, diketahui F hitung sebesar 5,172577 dengan probabilitas (*prob F-statistic*) sebesar 0,000000. Probabilitas lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa komisaris independen, kepemilikan institusional dan komite audit secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

##### b. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Kriteria pengujiannya adalah jika  $prob > \alpha = 0,05$  maka  $H_0$  diterima yang berarti bahwa variabel independen ke-i tidak memiliki pengaruh signifikan. Sebaliknya jika  $prob < \alpha = 0,05$  maka  $H_0$  ditolak yang berarti variabel independen ke-i memiliki pengaruh signifikan. Berikut ini disajikan hasil uji hipotesis :

Tabel 5  
Hasil Uji Hipotesis

Variabel	<i>t-statistic</i>	Signifikan	Keterangan
Komisaris Independen	-0.863479	0.3889	Tidak signifikan
Kepemilikan Institusional	1.980628	0.0490	Signifikan
Komite Audit	-2.172241	0.0310	Signifikan

Sumber :Data sekunder yang telah diolah

Model persamaan regresi data panel yang terbentuk yaitu sebagai berikut:

$$\text{Penghindaran Pajak} = 35,11970 - 0,087744 \text{ KI} + 0,263071 \text{ INST} - 7,363780 \text{ KA} + e$$

##### c. Koefisien determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ini menunjukkan kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terkait. Diketahui bahwa *Adjusted R-squared* sebesar 0,465229 atau 46,5%. Artinya variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 46,5%. Sedangkan 53,5% dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian ini.

#### 5. Pembahasan

##### a. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian diketahui bahwa variabel komisaris independen mempunyai nilai koefisien sebesar -0,087744 dengan nilai signifikansi sebesar 0,3889. Nilai sign probabilitas lebih besar dari 0,05, maka profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis yang telah dirumuskan ( $H_1$ ) ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tandean dan Winnie (2016) serta hasil penelitian Asri dan Suardana (2016) yang mengungkapkan bahwa ukuran dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak.

##### b. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional mempunyai nilai koefisien sebesar 0,263071 dengan nilai signifikansi sebesar 0,0490. Nilai sign probabilitas dari ukuran perusahaan lebih kecil dari 0,05 ( $< 0,05$ ) maka kepemilikan institusional berpengaruh positif

terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis yang telah dirumuskan (H2) diterima. Hasil ini mendukung penelitian oleh Fadhilah (2014) di mana keberadaan investor institusional ikut serta dalam pengawasan dan pengelolaan perusahaan terhadap kegiatan yang akan merugikan perusahaan termasuk adanya pajak agresif yang akan dilakukan perusahaan.

c. Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa komite audit mempunyai nilai koefisien sebesar -7,363780 dengan nilai signifikansi sebesar 0,0310. Nilai sign probabilitas dari ukuran perusahaan lebih kecil dari 0,05 ( $< 0,05$ ) maka jumlah komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis yang telah dirumuskan (H3) diterima. Fenny (2015), Nuralifmida (2012), dan Pohan (2008) meneliti tentang pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak dan menyimpulkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sementara penelitian Calvin dan I Made (2014) menyimpulkan bahwa keberadaan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari data perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel komisaris independen, kepemilikan institusional dan komite audit terhadap penghindaran pajak. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan program *evIEWS 9*. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah disajikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018. Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018, komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018.

### 2. Saran

Penelitian ini memiliki beberapa kekurangan, maka perlu dilakukan penyempurnaan penelitian untuk selanjutnya. Adapun saran untuk peneliti selanjutnya yaitu: Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan variabel moderasi, seperti kepemilikan manajerial, karena dengan adanya kepemilikan manajerial maka manajer akan mengontrol tindakan yang dapat merugikan dirinya sendiri. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah sampel perusahaan dengan menggunakan seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajija, Shochrul Rohmatul, dkk. (2011). *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Jakarta : Salemba Empat.
- Annisa, N. A., & Kurniasih, L. (2012). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, Vol. 8 No. 2 : 123-136.
- Dedy Djefris, Eliyanora Yossi & Septriani. (2018). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Empiris pada Perusahaan Manufaktur & Pertambangan yang Listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2016). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, Vol. 20. No. 2 : 58-79
- Diantari, P. R., & Ulupui, I. G. K.A. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 16. No. 1: 702-732.
- Dita Adhelia. (2018). *Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2014-2017)*. Skripsi Tidak Diterbitkan. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Dryeng, D.S, Hanlon, M., dan Maydew, L.E. (2010). The Effect of Executives on Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, Vol. 85. No. 4: 1163- 1189
- Fadhilah, Rahmi. (2014). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2009-2011). *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, Vol. 2. No. 1: 45-60
- Ghozali, I (2013). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan EVIEWS 8*. Edisi Pertama. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- [https://www.youtube.com/watch?v=y2\\_wrcHS1qU](https://www.youtube.com/watch?v=y2_wrcHS1qU). Diakses pada tanggal 5 Maret 2020 pukul 21.00 WIB.
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the Firm: Manajerial Hehaviour, Agency Cost and Ownership. *Strategic Management Journal*, Vol. 21. No. 4:1215-1224.
- Kurniasih, T., & Sari, M. M. R. (2013). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, Vol. 18. No. 1: 58-66.
- Masri, Indah dan Dwi Martani. (2012). *Pengaruh Tax Avoidance terhadap Cost of Debt*. Jakarta: Simposium Nasional Akuntansi XV (Banjarmasin).
- Minnick, Kristina dan Tracy Noga. (2010). Do Corporate Governance Characteristic Influence Tax Management. *Journal of Corporate Finance*, Vol. 16: 703-718.
- Puspita, S.R. (2014). *Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Studi terhadap Perusahaan Non-Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2012)*. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Santoso, T.B. (2014). Pengaruh Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3 (Semarang : Universitas Diponegoro):1-37.
- Sari, Gusti Maya. (2013). Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Fiskal dan Struktur Kepemilikan terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI). *Jurnal WRA*, Vol. 2. No. 2: 47-62
- Solihin, Ismail. (2009). *Corporate Social Responsibility: From Charuty to Sustanibility*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sunarsih, U., & Oktavia , A. R. (2016). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan* , 923-932.
- Wulandari, S., & Budiaji, A. (2018). Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Ekonomi Islam UIN Sulta Maulana Hasanuddin Banten*, Vol. 8. No. 2 : 239-268
- [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Diakses pada tanggal 15 April 2020 pukul 15.00 WIB.